



# Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 320-327  
ISSN: 3110-8229 (Print) ISSN: 3110-6994 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/ascendia/index>

## Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Beban dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Agus Setiawan<sup>1\*</sup>, Akbar Aprian H<sup>2</sup>, Gading Rayhan Al-Ikbar<sup>3</sup>, Masyhuri<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: [agussetiawn0210@gmail.com](mailto:agussetiawn0210@gmail.com)<sup>1</sup>, [akbaraprian.h05@gmail.com](mailto:akbaraprian.h05@gmail.com)<sup>2</sup>, [dingayhan3108@gmail.com](mailto:dingayhan3108@gmail.com)<sup>3</sup>, [masyhuri.akuntansi@gmail.com](mailto:masyhuri.akuntansi@gmail.com)<sup>4</sup>

### Article Info :

Received:  
26-10-2025  
Revised:  
29-11-2025  
Accepted:  
13-12-2025

### Abstract

*This study examines the recognition of revenue and expense from the perspective of Islamic accounting, emphasizing the integration between technical accounting standards, contractual substance, and ethical values derived from Sharia principles. Revenue recognition in Islamic accounting is not merely concerned with economic inflows but also with the legitimacy of transactions, clarity of contracts, and the realization of lawful benefits. Similarly, expense recognition reflects accountability in the use of resources and must correspond fairly to the benefits generated. The study adopts a qualitative literature-based approach by analyzing books, academic journals, and relevant accounting standards related to Islamic financial reporting. The discussion reveals that improper or unbalanced recognition of revenue and expense may distort financial performance and undermine stakeholder trust. Islamic accounting promotes prudence, fairness, and transparency to ensure that reported profits reflect actual economic conditions. The integration of revenue and expense recognition is therefore essential in producing reliable, ethical, and Sharia-compliant financial statements. This study highlights that Islamic accounting is not solely profit-oriented but is deeply rooted in moral responsibility and social accountability.*

**Keywords:** *Islamic accounting, revenue recognition, expense recognition, sharia compliance, financial reporting.*

### Abstrak

Studi ini mengkaji pengakuan pendapatan dan beban dari perspektif akuntansi Islam, dengan menekankan integrasi antara standar akuntansi teknis, substansi kontrak, dan nilai-nilai etis yang berasal dari prinsip-prinsip Syariah. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi Islam tidak hanya berkaitan dengan arus masuk ekonomi, tetapi juga dengan keabsahan transaksi, kejelasan kontrak, dan realisasi manfaat yang sah. Demikian pula, pengakuan beban mencerminkan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya dan harus sesuai secara adil dengan manfaat yang dihasilkan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur dengan menganalisis buku, jurnal akademik, dan standar akuntansi yang relevan terkait pelaporan keuangan Islam. Pembahasan menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban yang tidak tepat atau tidak seimbang dapat merusak kinerja keuangan dan merusak kepercayaan pemangku kepentingan. Akuntansi Islam mempromosikan kehati-hatian, keadilan, dan transparansi untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Integrasi pengakuan pendapatan dan beban oleh karena itu esensial dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, etis, dan sesuai syariah. Studi ini menyoroti bahwa akuntansi Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi mendalam dalam tanggung jawab moral dan akuntabilitas sosial.

**Kata kunci:** Akuntansi Islam, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, kepatuhan syariah, pelaporan keuangan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan praktik akuntansi syariah menunjukkan kebutuhan yang semakin kuat terhadap kerangka pengakuan pendapatan dan beban yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan amanah. Akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pelaporan keuangan (Dusuki & Abdullah, 2007). Pengakuan pendapatan dan beban menjadi elemen krusial karena berpengaruh langsung terhadap penilaian kinerja, posisi keuangan, serta tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Literatur perbankan dan keuangan Islam menegaskan bahwa

ketepatan pengakuan transaksi merupakan fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga berbasis syariah (Hassan & Lewis, 2007).

Dalam perspektif akuntansi syariah, pendapatan tidak dipahami semata sebagai peningkatan manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai hasil transaksi yang harus memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, dan kejelasan akad. Penelitian mengenai pengakuan pendapatan dalam akuntansi syariah menekankan pentingnya kesesuaian antara substansi ekonomi dan ketentuan syariah agar tidak terjadi distorsi nilai dalam laporan keuangan (Munawwarah & Sari, 2019). Konsep ini memperluas makna pendapatan dari sekadar angka akuntansi menjadi refleksi etika bisnis Islam. Kerangka konseptual tersebut diperkuat oleh pemikiran akuntansi syariah yang menempatkan tanggung jawab moral sebagai bagian inheren dari proses pencatatan dan pelaporan (Wahyudi, 2015).

Beban dalam akuntansi syariah juga memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya. Beban dipandang sebagai pengorbanan ekonomi yang harus diakui secara adil dan proporsional sesuai manfaat yang dihasilkan. Kajian mengenai konsep pendapatan dan beban menunjukkan bahwa ketepatan waktu dan dasar pengakuan berperan penting dalam menjaga kewajaran laporan keuangan (Barutu et al., 2025). Pemahaman yang keliru atas beban berpotensi menimbulkan ketidakadilan distribusi hasil usaha dan pelanggaran prinsip syariah.

Praktik pengakuan pendapatan dan beban di lapangan sering kali masih dipengaruhi oleh standar konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai syariah. Penelitian berbasis PSAK menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan standar pengakuan pendapatan pada berbagai sektor usaha, khususnya ketika karakteristik transaksi bersifat kompleks (Sabriadi et al., 2025). Temuan serupa juga muncul dalam studi pada perusahaan BUMN yang menunjukkan perlunya penyesuaian konseptual agar pengakuan pendapatan dan beban mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Purba et al., 2024). Kondisi ini membuka ruang kajian kritis mengenai relevansi dan kesesuaian standar yang diterapkan dengan prinsip akuntansi syariah.

Isu pengakuan pendapatan dan beban semakin kompleks pada sektor konstruksi yang memiliki karakteristik kontrak jangka panjang dan risiko tinggi. Penelitian mengenai penerapan PSAK 72 pada perusahaan jasa konstruksi menunjukkan bahwa metode pengakuan sangat memengaruhi penyajian kinerja keuangan (Ayu & Mariadi, 2024). Implementasi standar tersebut menuntut profesionalisme dan kehati-hatian agar tidak terjadi pengakuan yang menyesatkan. Studi kasus lain pada perusahaan konstruksi menegaskan bahwa konsistensi dan kepatuhan terhadap standar menjadi faktor penentu kualitas laporan keuangan (Ratuanik et al., 2024).

Dalam keuangan Islam, prinsip konservatisme memiliki posisi strategis dalam menghindari kesalahan pelaporan yang merugikan pihak tertentu. Konservatisme dipahami sebagai sikap kehati-hatian yang sejalan dengan nilai tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak semua pihak. Penelitian mengenai konservatisme dalam perspektif syariah menunjukkan adanya preferensi terhadap pengakuan yang tidak melebih-lebihkan pendapatan dan tidak meremehkan beban (Lubis & Lubis, 2025). Prinsip ini memperkuat urgensi kajian pengakuan pendapatan dan beban yang berlandaskan etika syariah.

Penyajian laporan keuangan syariah juga dipengaruhi oleh standar pelaporan khusus yang mengatur struktur dan substansi informasi keuangan. PSAK 101 menegaskan bahwa laporan keuangan entitas syariah harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara menyeluruh. Analisis laporan keuangan dalam perspektif standar tersebut menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban memiliki peran sentral dalam membentuk informasi yang andal dan relevan (Susanty, 2024). Kesesuaian antara pengakuan dan penyajian menjadi indikator utama kualitas pelaporan keuangan syariah.

Pengembangan akuntansi syariah menuntut pendekatan teoritis dan praktis yang saling melengkapi agar konsep yang dibangun dapat diterapkan secara konsisten. Literatur pengantar akuntansi syariah menekankan bahwa pengakuan pendapatan dan beban harus diletakkan dalam kerangka nilai tauhid, keadilan, dan amanah (Mutaufiq et al., 2024). Kajian yang mendalam mengenai pengakuan pendapatan dan pengakuan beban dalam perspektif akuntansi syariah menjadi relevan untuk menjembatani kesenjangan antara teori, standar, dan praktik. Atas dasar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengakuan pendapatan dan beban yang tidak hanya memenuhi aspek teknis akuntansi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang menitikberatkan pada penelaahan mendalam terhadap konsep, prinsip, dan praktik pengakuan pendapatan serta pengakuan beban dalam perspektif akuntansi syariah. Data penelitian bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta peraturan dan standar akuntansi syariah yang relevan, termasuk PSAK yang mengatur pengakuan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi literatur untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan antara pendekatan akuntansi syariah dan konvensional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan teoritis dan empiris guna membangun pemahaman yang utuh mengenai landasan konseptual dan implikasi praktis pengakuan pendapatan dan beban dalam akuntansi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Konseptual Pengakuan Pendapatan dalam Perspektif Akuntansi Syariah**

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi syariah berangkat dari pemahaman bahwa pendapatan tidak hanya mencerminkan arus masuk manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjunjung nilai keadilan dan amanah. Pendapatan diposisikan sebagai hasil dari transaksi yang sah secara akad dan substansi, sehingga tidak semua penerimaan kas dapat langsung diakui sebagai pendapatan. Kerangka ini selaras dengan tujuan maqasid al-shariah yang menempatkan perlindungan harta dan keadilan transaksi sebagai prioritas utama dalam aktivitas ekonomi (Dusuki & Abdullah, 2007). Literatur perbankan Islam menegaskan bahwa kesalahan dalam pengakuan pendapatan berpotensi menimbulkan ketidakadilan informasi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga syariah (Hassan & Lewis, 2007).

Pendekatan akuntansi syariah memandang pengakuan pendapatan sebagai proses yang harus mempertimbangkan kejelasan akad, waktu realisasi manfaat, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak. Pendapatan baru dapat diakui ketika risiko dan manfaat ekonomi telah berpindah secara sah sesuai akad yang digunakan. Penelitian mengenai pengakuan pendapatan syariah menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi fondasi penting agar tidak terjadi pengakuan prematur yang bertentangan dengan nilai kejujuran (Munawwarah & Sari, 2019). Konsep ini diperkuat oleh pandangan akuntansi syariah yang menempatkan etika sebagai bagian integral dari sistem pencatatan dan pelaporan keuangan (Wahyudi, 2015).

Secara konseptual, pendapatan dalam akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari hubungan sebab akibat antara usaha, risiko, dan hasil. Pendapatan yang diakui harus mencerminkan nilai tambah nyata yang dihasilkan dari aktivitas produktif yang halal. Kajian mengenai konsep pendapatan dan beban menegaskan bahwa pengakuan yang tepat berperan dalam menjaga kewajaran laporan keuangan serta menghindari manipulasi informasi (Barutu et al., 2025). Ketepatan konsep ini menjadi sangat penting karena laporan keuangan syariah tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial.

Prinsip pengakuan pendapatan dalam praktik sering kali menghadapi tantangan ketika standar akuntansi diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan karakteristik transaksi syariah. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan standar pengakuan pendapatan pada perusahaan tertentu masih berfokus pada aspek formal, sementara substansi akad belum sepenuhnya menjadi perhatian utama (Sabriadi et al., 2025). Temuan serupa juga terlihat pada perusahaan besar yang menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi agar lebih mencerminkan realitas ekonomi transaksi (Purba et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif akuntansi syariah dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Pengakuan pendapatan dalam sektor konstruksi memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas penerapan prinsip syariah dalam transaksi jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan sangat memengaruhi penyajian kinerja dan stabilitas laporan keuangan perusahaan jasa konstruksi (Ayu & Mariadi, 2024). Implementasi PSAK 72 menuntut ketepatan estimasi dan konsistensi penerapan agar pendapatan tidak diakui secara berlebihan. Studi lain menegaskan bahwa pemilihan metode pengakuan pendapatan harus diselaraskan dengan substansi kontrak agar tidak menimbulkan bias informasi (Ratuanik et al., 2024):

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Pengakuan Pendapatan Konvensional dan Syariah

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
Dasar Pengakuan	Realisasi ekonomi dan kontraktual	Akad sah dan kepastian manfaat
Orientasi	Laba dan kinerja keuangan	Keadilan, amanah, dan kemaslahatan
Risiko	Dapat diakui sebelum sepenuhnya berpindah	Diakui setelah risiko berpindah secara sah
Dimensi Etika	Implisit	Eksplisit dan normatif

Sumber: Dusuki & Abdullah (2007); Hassan & Lewis (2007); Munawwarah & Sari (2019); Wahyudi (2015); Barutu et al. (2025).

Data perbandingan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah menempatkan dimensi etika dan kejelasan akad sebagai syarat utama pengakuan pendapatan. Perbedaan ini menjelaskan mengapa pendekatan syariah cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan waktu pengakuan. Penelitian mengenai konservatisme dalam keuangan Islam menegaskan bahwa sikap tidak melebihi pendapatan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pemangku kepentingan (Lubis & Lubis, 2025). Prinsip ini memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai sistem yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai moral.

Penerapan prinsip akrual dalam lembaga keuangan syariah juga menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan nilai syariah. Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi akrual berpotensi menimbulkan pengakuan pendapatan yang belum sepenuhnya terealisasi secara ekonomi dan syariah (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Tantangan ini menuntut adanya penyesuaian kebijakan akuntansi agar prinsip akrual tidak bertentangan dengan kejelasan hak dan kewajiban. Pendekatan syariah mendorong agar akrual digunakan secara selektif dan bertanggung jawab.

Implementasi pengakuan pendapatan pada produk keuangan syariah menunjukkan variasi praktik yang dipengaruhi oleh jenis akad yang digunakan. Studi pada produk layanan emas dan sewa menyewa menegaskan bahwa pengakuan pendapatan harus mengikuti karakteristik akad murabahah, ijarah, dan akad terkait lainnya (Aminin et al., 2025; Ramadani & Ulyah, 2025). Ketidakesesuaian antara akad dan metode pengakuan berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam atas akad dalam praktik akuntansi syariah.

Pendekatan masyarakat lokal terhadap pengakuan pendapatan juga memberikan perspektif penting dalam pengembangan akuntansi syariah. Penelitian pada praktik ekonomi tradisional menunjukkan bahwa nilai keadilan dan keseimbangan telah lama diterapkan secara substantif meskipun belum terstruktur secara formal (Nurhaliza et al., 2024; Auni et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip syariah memiliki relevansi kuat dalam berbagai konteks ekonomi. Akuntansi syariah berperan dalam memformalkan nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan secara konsisten.

Pengakuan pendapatan dalam perspektif akuntansi syariah menuntut keselarasan antara standar akuntansi, substansi akad, dan nilai etika Islam. Kajian mengenai akad istishna, akad pelengkap, serta praktik gadai menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi memiliki implikasi pengakuan yang berbeda (Pratiwi & Sisdianto, 2024; Fahmi & Rosyidah, 2025; Muhammad, 2021). Penelitian lain juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan penjualan angsuran agar tidak terjadi pengakuan yang menyesatkan (NUPUS, 2021). Landasan konseptual ini menjadi pijakan penting bagi pembahasan pengakuan beban dalam perspektif akuntansi syariah pada bagian selanjutnya.

Pengakuan Beban dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Pengakuan beban dalam akuntansi syariah menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan prinsip pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas. Beban tidak sekadar dipahami sebagai pengorbanan ekonomi, melainkan sebagai konsekuensi dari aktivitas usaha yang harus dipertanggungjawabkan secara adil dan transparan. Akuntansi syariah menekankan bahwa beban yang diakui harus berasal dari transaksi yang halal serta mendukung tujuan kemaslahatan. Pandangan ini sejalan dengan maqasid al-shariah yang menempatkan perlindungan harta dan keadilan distribusi sebagai elemen fundamental dalam praktik ekonomi (Dusuki & Abdullah, 2007).

Secara konseptual, pengakuan beban dalam akuntansi syariah menuntut adanya hubungan yang jelas antara beban yang dicatat dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Beban tidak dapat diakui secara

arbitrer karena setiap pengakuan memengaruhi informasi laba yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Literatur keuangan Islam menjelaskan bahwa kesalahan pengakuan beban berpotensi menimbulkan ketidakadilan informasi bagi pemilik dana dan pemangku kepentingan lainnya (Hassan & Lewis, 2007). Oleh sebab itu, akuntansi syariah mendorong kehati-hatian agar beban diakui sesuai periode dan tujuan penggunaannya.

Pengakuan beban juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep pendapatan karena keduanya membentuk hasil usaha yang dilaporkan. Kajian mengenai konsep pendapatan dan beban menegaskan bahwa ketepatan pengakuan beban menjadi kunci dalam menjaga kewajaran laporan keuangan (Barutu et al., 2025). Beban yang diakui terlalu cepat atau terlalu lambat dapat mengaburkan kinerja riil entitas. Akuntansi syariah memandang ketepatan ini sebagai bagian dari amanah pengelolaan keuangan.

Pengakuan beban sering kali menghadapi kendala akibat dominasi pendekatan teknis yang kurang mempertimbangkan nilai syariah. Penelitian empiris menunjukkan bahwa beberapa entitas masih mengakui beban berdasarkan kebiasaan akuntansi konvensional tanpa menelaah substansi akad dan manfaat ekonominya (Purba et al., 2024). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realitas ekonomi transaksi. Akuntansi syariah menuntut evaluasi kritis agar setiap beban yang diakui mencerminkan aktivitas usaha yang sah dan bermanfaat.

Pengakuan beban pada sektor konstruksi menunjukkan kompleksitas yang signifikan karena melibatkan biaya jangka panjang dan estimasi yang berkelanjutan. Penelitian mengenai pembebanan biaya kontrak konstruksi menunjukkan bahwa metode yang digunakan sangat memengaruhi kestabilan laporan laba rugi (Ayu & Mariadi, 2024). Ketepatan pembebanan biaya menjadi penting agar tidak terjadi distorsi kinerja antarperiode. Studi lain menegaskan bahwa konsistensi metode pembebanan biaya merupakan prasyarat utama kualitas pelaporan keuangan (Ratuanik et al., 2024):

**Tabel 2. Prinsip Pengakuan Beban dalam Akuntansi Konvensional dan Syariah**

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
Dasar Pengakuan	Matching cost dengan revenue	Kesesuaian manfaat dan kehalalan transaksi
Orientasi	Efisiensi dan laba	Keadilan, amanah, dan tanggung jawab
Pendekatan Estimasi	Fleksibel	Berhati-hati dan berlandaskan akad
Dimensi Etika	Tidak eksplisit	Melekat dalam setiap pengakuan

Sumber: Wahyudi (2015); Barutu et al. (2025); Hassan & Lewis (2007); Dusuki & Abdullah (2007).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengakuan beban dalam akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada hasil keuangan, tetapi juga pada legitimasi moral transaksi. Pendekatan ini menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi dalam penggunaan estimasi biaya. Penelitian mengenai konservatisme dalam keuangan Islam menegaskan bahwa kecenderungan untuk tidak meremehkan beban merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemilik dana (Lubis & Lubis, 2025). Prinsip ini memperkuat peran akuntansi syariah sebagai instrumen pengendalian etis.

Penerapan prinsip akrual dalam pengakuan beban pada lembaga keuangan syariah juga memunculkan tantangan tersendiri. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akrual tanpa pengendalian yang memadai berpotensi mengaburkan realisasi manfaat ekonomi (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Akuntansi syariah menuntut agar pengakuan beban berbasis akrual tetap memperhatikan kepastian manfaat dan kejelasan akad. Pendekatan ini bertujuan menjaga keandalan informasi keuangan.

Pengakuan beban pada produk keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh jenis akad yang mendasarinya. Studi pada penerapan PSAK 102 dan PSAK 107 menunjukkan bahwa pembebanan biaya harus disesuaikan dengan karakteristik akad murabahah, ijarah, dan akad sejenisnya (Aminin et al., 2025; Ramadani & Ulyah, 2025). Ketidaktepatan pembebanan biaya dapat menimbulkan bias informasi dan menurunkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman akad dalam praktik akuntansi syariah.

Praktik pengakuan beban dalam aktivitas ekonomi masyarakat juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan akuntansi syariah. Penelitian pada praktik ekonomi lokal menunjukkan bahwa pembebanan biaya dilakukan secara proporsional berdasarkan manfaat yang dirasakan bersama (Auni et al., 2025). Nilai keadilan dan keseimbangan tersebut sejalan dengan prinsip dasar akuntansi syariah. Formalisasi praktik ini dalam sistem akuntansi modern menjadi tantangan sekaligus peluang pengembangan.

Pengakuan beban dalam perspektif akuntansi syariah menuntut integrasi antara standar akuntansi, substansi transaksi, dan nilai etika Islam. Kajian mengenai akad istishna, akad pelengkap, serta praktik gadai menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi memiliki implikasi pembebanan biaya yang berbeda (Pratiwi & Sisdianto, 2024; Fahmi & Rosyidah, 2025; Muhammad, 2021). Penelitian lain juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pembebanan biaya penjualan angsuran agar tidak menyesatkan laporan keuangan (NUPUS, 2021). Landasan ini menjadi dasar penting untuk membahas keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban dalam perspektif akuntansi syariah pada sub bahasan berikutnya.

**Keterpaduan Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Pelaporan Keuangan Syariah**

Keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban dalam akuntansi syariah menjadi fondasi utama dalam membentuk laporan keuangan yang adil dan dapat dipercaya. Pendapatan dan beban tidak dipandang sebagai elemen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dua komponen yang saling terkait dalam menggambarkan hasil usaha yang sebenarnya. Akuntansi syariah menempatkan keterpaduan ini dalam kerangka amanah pengelolaan harta yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal dan moral. Pandangan ini selaras dengan maqasid al-shariah yang menekankan keseimbangan antara penciptaan nilai ekonomi dan perlindungan kepentingan seluruh pihak (Dusuki & Abdullah, 2007).

Pengakuan pendapatan dan beban yang terpadu memastikan bahwa laba yang dilaporkan mencerminkan kinerja ekonomi yang riil. Literatur keuangan Islam menegaskan bahwa laporan keuangan yang tidak mencerminkan hubungan wajar antara pendapatan dan beban berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan (Hassan & Lewis, 2007). Akuntansi syariah menuntut kesesuaian periode pengakuan agar hasil usaha tidak dimanipulasi secara temporal. Prinsip ini memperkuat posisi laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian mengenai pengakuan pendapatan dalam akuntansi syariah menunjukkan bahwa ketepatan waktu pengakuan harus diimbangi dengan ketepatan pembebanan biaya. Pengakuan pendapatan yang tidak diiringi pembebanan biaya yang proporsional dapat menghasilkan laba semu yang bertentangan dengan nilai keadilan (Munawwarah & Sari, 2019). Akuntansi syariah memandang laba sebagai hasil akhir dari proses usaha yang sah, bukan sebagai tujuan yang dicapai melalui rekayasa akuntansi. Kerangka ini mempertegas peran etika dalam setiap tahapan pelaporan keuangan (Wahyudi, 2015).

Keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban juga berperan penting dalam menjaga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Kajian mengenai konsep pendapatan dan beban menegaskan bahwa keseimbangan pengakuan keduanya berpengaruh langsung terhadap kualitas informasi keuangan (Barutu et al., 2025). Ketidakseimbangan dalam pengakuan akan memengaruhi persepsi kinerja dan posisi keuangan entitas. Akuntansi syariah menuntut agar keseimbangan tersebut dijaga melalui kebijakan akuntansi yang konsisten dan berlandaskan akad.

Temuan empiris menunjukkan bahwa tantangan keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban masih sering terjadi dalam praktik. Penelitian pada perusahaan menunjukkan adanya kecenderungan fokus pada pengakuan pendapatan, sementara pembebanan biaya belum sepenuhnya mencerminkan substansi transaksi (Purba et al., 2024). Studi lain menegaskan bahwa penerapan standar pengakuan pendapatan tanpa diimbangi pengendalian pembebanan biaya dapat mengurangi kualitas laporan keuangan (Sabriadi et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam akuntansi syariah:

**Tabel 3. Dampak Keterpaduan Pengakuan Pendapatan dan Beban terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syariah**

Aspek Penilaian	Pengakuan Tidak Terpadu	Pengakuan Terpadu Syariah
Kualitas Laba	Berpotensi bias	Mencerminkan kinerja riil

Transparansi Kepatuhan Syariah Kepercayaan Stakeholder	Terbatas Parsial Rentan menurun	Tinggi dan informatif Menyeluruh Cenderung meningkat
Sumber: Dusuki & Abdullah (2007); Hassan & Lewis (2007); Barutu et al. (2025); Munawwarah & Sari (2019).		

Data tersebut menunjukkan bahwa keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan syariah. Pendekatan terpadu membantu entitas menghindari pengakuan laba yang tidak berkelanjutan. Prinsip konservatisme dalam keuangan Islam memperkuat kebutuhan akan keterpaduan ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaporan (Lubis & Lubis, 2025). Konservatisme syariah berfungsi menjaga keseimbangan antara optimisme usaha dan perlindungan kepentingan pemilik dana.

Penerapan keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban dalam basis akrual memerlukan pengendalian yang ketat. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akrual tanpa integrasi yang baik berpotensi menghasilkan perbedaan signifikan antara laporan dan realisasi kas (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Akuntansi syariah menekankan bahwa basis akrual harus digunakan secara bertanggung jawab dan selaras dengan kejelasan akad. Pendekatan ini menjaga agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.

Keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban juga tercermin dalam penerapan standar akuntansi syariah pada berbagai akad. Studi mengenai PSAK 72, PSAK 102, dan PSAK 107 menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan harus diikuti pembebanan biaya yang konsisten sesuai karakteristik akad (Ayu & Mariadi, 2024; Ratuanik et al., 2024; Aminin et al., 2025; Ramadani & Ulyah, 2025). Ketidaksinkronan antara keduanya dapat menurunkan relevansi laporan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman teknis dan substantif dalam praktik akuntansi syariah.

Penyajian laporan keuangan syariah menuntut keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban agar informasi yang disajikan dapat dipahami secara utuh. PSAK 101 menekankan bahwa laporan keuangan entitas syariah harus mencerminkan kepatuhan syariah secara menyeluruh, termasuk dalam pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan (Susanty, 2024). Keterpaduan ini berfungsi sebagai indikator kualitas pelaporan dan kepatuhan standar. Laporan yang terpadu memperkuat fungsi laporan keuangan sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan.

Keterpaduan pengakuan pendapatan dan beban dalam perspektif akuntansi syariah merupakan prasyarat utama terciptanya laporan keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Literatur pengantar akuntansi syariah menegaskan bahwa integrasi aspek teknis, akad, dan nilai moral menjadi ciri khas sistem akuntansi syariah (Mutaufiq et al., 2024). Temuan dari berbagai praktik akad, termasuk istishna, akad pelengkap, gadai, dan penjualan angsuran, menunjukkan bahwa keterpaduan pengakuan menjadi kunci kualitas pelaporan (Pratiwi & Sisdianto, 2024; Fahmi & Rosyidah, 2025; Muhammad, 2021; NUPUS, 2021). Pembahasan ini menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses dan nilai yang melandasinya.

## KESIMPULAN

Pengakuan pendapatan dan pengakuan beban dalam perspektif akuntansi syariah menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek teknis akuntansi, substansi akad, dan nilai etika Islam. Pendapatan dan beban tidak hanya diperlakukan sebagai komponen pembentuk laba, tetapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan harta yang harus mencerminkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Keterpaduan pengakuan keduanya berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan kinerja ekonomi yang riil serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga akuntansi syariah menempatkan pengakuan pendapatan dan beban sebagai instrumen akuntabilitas yang tidak terpisahkan dari tujuan syariah dan keberlanjutan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

Aminin, R. I., Angganita, N. A. H., Samsiah, T., & Azizah, S. N. (2025). Analisis Kesesuaian Pencatatan Dan Pengakuan Akuntansi Produk Layanan Emas Terhadap Psak 102 Dan Psak 107 (Studi Pada Bsi Kcp Surabaya Rungkut 1). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 60-74. <https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.9892>.

- Auni, A., Noviriani, E., & Roshani, R. (2025). Kajian Perspektif Akuntansi Pada Arisan Non Pernikahan Desa Sejiram Kabupaten Sambas. *Solusi*, 23(4). <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i4.12090>.
- Ayu, N. A. K., & Mariadi, Y. (2024). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pembebanan Biaya Kontrak Konstruksi Menurut Psak No. 72 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Pada Cv. Wanamartha Anugerah Samawa). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(4), 775-781. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.655>.
- Barutu, R. W., Siregar, E., Sihalohe, N. N., Lumbantobing, E. M., & Aruan, H. M. G. P. (2025). Konsep Pendapatan Dan Beban. *Economics And Digital Business Review*, 6(2), 1594-1601. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2717>.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). "Maqasid Al-Shariah, Masalahah And Corporate Social Responsibility." *The American Journal Of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Fahmi, I., & Rosyidah, U. (2025). Analisis Akad-Akad Pelengkap Dalam Akuntansi Syariah: Analisis Akad-Akad Pelengkap Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Istiqro*, 11(2), 136-150. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i2.3999>.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook Of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Lubis, M. R., & Lubis, P. S. (2025). Prinsip Konservatisme Dalam Keuangan Islam Dan Preferensi Asimetris Terhadap Kesalahan Pelaporan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 102-112. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5493>.
- Muhammad, W. (2021). *Analisis Praktik Pagang Gadai Pengakuan, Pencatatan Dan Pelaporan Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Munawwarah, N., & Sari, R. F. (2019). "Pengakuan Pendapatan Dalam Akuntansi Syariah: Kajian Prinsip Dan Implementasi." *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 123-134.
- Mutaufiq, A., Mutaqin, A. Z., Nurfaedah, N., & Wijandari, A. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nupus, K. (2021). *Analisis Pengakuan Pendapatan Atas Penjualan Angsuran Mobil Berdasarkan Psak No. 23 (Studi Pada Cv. Suria Bintang Perkasa Tanjungpinang)* (Doctoral Dissertation, Stie Pembangunan Tannjungpinang).
- Nurhaliza, N., Hadijah, S., & Rufaida, E. R. (2024). Analisis Metode Pengukuran Pendapatan Pata'gal Lita Perspektif Akuntansi Syariah Di Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 421-433. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.166>.
- Pratiwi, H. A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Implementasi Penggunaan Psak 104 Tentang Akad Istishna Dalam Produk Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1293>.
- Purba, C. F., Sihombing, H., & Siboro, D. T. (2024). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Ptpn Iii (Persero) Medan. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 168-177. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i2.629>.
- Ramadani, M., & Ulyah, H. (2025). Implementasi Psak 107 (Sewa Menyewa) Pada Pencatatan Keuangan Di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 122-146. <https://doi.org/10.32923/E2bstz18>.
- Ratuanik, P. K. F., Anggarani, D., & Hasan, K. (2024). Analisis Implementasi Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 Pada Perusahaan Konstruksi Studi Kasus Pada Pt X. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 2(1), 64-81.
- Rosmanidar, E., & Prayogo, Y. (2022). Problematika Penerapan Accrual Accounting Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research*, 6(2), 225-240. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526>.
- Sabriadi, S., Menne, F., & Setiawan, A. (2025). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Psak No. 34 Pada Pt Faf Yuzal Pratama. *Access: Journal Of Accounting, Finance And Sharia Accounting*, 3(1), 44-51.
- Susanty, W. (2024). Analisis Laporan Keuangan Dalam Perspektif Psak 101. *Journal Research Of Economic And Bussiness*, 3(02), 35-44.
- Wahyudi, S. (2015). "Akuntansi Syariah: Konsep Dan Praktik." Jakarta: Salemba Empat.